

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI LARITI DI DESA SORO
KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

**(Evaluation Of The Policy Bima Regency Government In Developing The
Lariti Beach Tourist Attraction In Soro Village, Lambu Sape District, Bima
Regency)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

LILA ARIANI

218110160

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2001-2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI LARITI DI DESA SORO
KECAMATAN LAMBU SAPE KABUPATEN BIMA**

Oleh :

LILA ARIANI
218110160

Untuk Memenuhi Ujian Sripsi
Pada Tanggal 08 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing 1

Mardiah, S.Sos., M.Si
NIDN. 0804117201

Pembimbing II

Drs. Ramayanto, M.M
NIDN. 0809096702

Mengetahui.,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI LARITI DI DESA SORO
KECAMATAN LAMBU SAPE KABUPATEN BIMA**

Oleh :

LILA ARIANI
218110160

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 08 Februari 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim penguji

Mardiah, S.Sos., M.Si
NIDN. 0804117201

(PU) (.....)

Ramayanto, MM.
NIDN. 0809096702

(PP) (.....)

Dedy Iswanto, ST., M.M
NIDN. 0818087901

(PN) (.....)

Mengetahui,.

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lila Ariani

Nim : 218110160

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, 15 februari 2022

Mahasiswa



Lila Ariani
218110160



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILA ARIANI
NIM : 218110160
Tempat/Tgl Lahir : Taloko, 30 oktober 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipa
No. Hp : 085 337 233 670
Email : lilaariani33@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan
Objek Wisata Pantai Laribi di Desa Soro kec Lambu Kab. Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 / Maret2022
Penulis



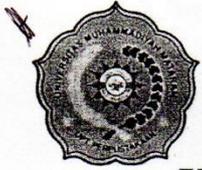
Lila Ariani
NIM. 218110160

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lila Ariani
NIM : 218110160
Tempat/Tgl Lahir : Taloko, 30 Oktober 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 337 233 670 / lilaariani@gmail
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam
Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro
Kecamatan Soro Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Maret2022
Penulis



LILA ARIANI
NIM. 218110160

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Ku Olah Kata, Ku Baca Makna, Ku Ikat Dalam Alinea, Ku Bingkai
Dalam Bab Sejumlah Lima, Jadilah Sebuah Mahakarya. Gelar Sarjana

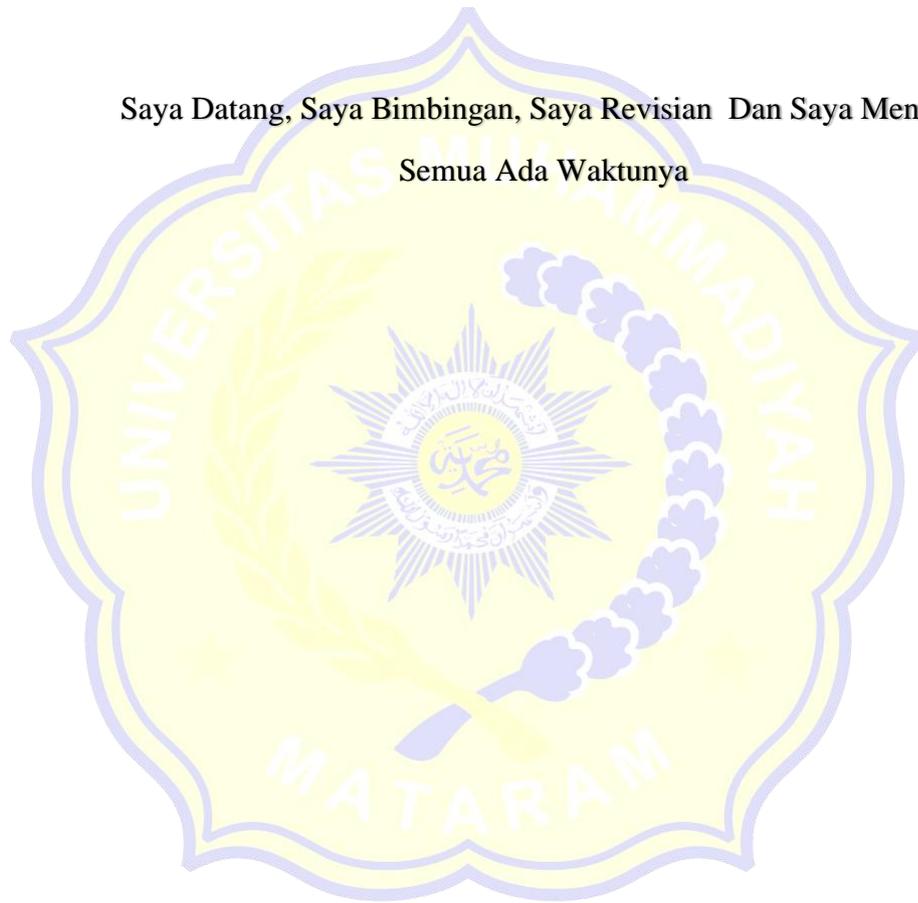
Ku Terima

Orang Tuapun Bahagia.



Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Revisian Dan Saya Menang

Semua Ada Waktunya



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis di beri kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan baik. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih penulis ucapkan untuk :

1. Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Keluarga tercinta, kedua orang tuaku sahbudin dan nurhayati, kakek nenekku abakir dan hadidah, adik-adikku imam, rara dan anaf serta paman ku gunawansyah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang Bahagia di dunia maupun di akhirat.
3. Orang-orang baik, abdul puasa, ahamid serta anggi yang senantiasa selalu membantu dalam masalah apapun, serta memberi motivasi, dan juga senatisa meminjamkan leptopnya mulai saya menyusun proposal sampai dengan skripsi dan selalu memberikan semangat dalam hidup ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik
5. Teman-teman kelas D administrasi publik , yang 3,5 tahun berjuang Bersama, yang senantiasa menginspirasi, dan membantu, serta mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
6. Bapak/ ibu pembimbing, Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Bapak Drs Ramayanto, M.M Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
7. Bapak/ ibu dosen, TU fakultas fisipol, yang senantiasa mengajarkan saya dari awal sampai sekarang, membantu dalam hal yang berkaitan dengan

akademis dll sehingga saya dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas akhir saya

8. Almamaterku tercinta universitas Muhammadiyah mataram



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape Kabupaten Bima ”**skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap Selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs Ramayanto, M.M Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tentunya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang selalu memberi semangat, membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan.



EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI LARITI DI DESA SORO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Lila Ariani¹, Mardiah², Ramayanto³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lariti dan mengetahui dampak kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima bagi perkembangan Wisata Pantai Lariti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lariti ada beberapa bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada pasal 19 yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu, Perintisan pengembangan daya Tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah, Pembangunan daya Tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada, Pemantapan daya Tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas, Revitalisasi daya Tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD dan juga ada beberapa dampak yaitu secara ekonomi, sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM). Kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bima, untuk terus memberikan kebijakan yaitu, membina dan memfasilitasi, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, Kepada masyarakat Desa Soro agar tetap menjaga apa yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima Yaitu seperti pembangunan infrastruktur jalan, maupun fasilitas yang lainnya. Dan juga tetap menjaga kebersihan, keunikan dan keaslian yang berada di Pantai Lariti

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima*

**POLICY EVALUATION OF THE GOVERNMENT OF BIMA REGENCY IN
DEVELOPING THE LARITI BEACH TOURISM OBJECT IN SORO
VILLAGE, LAMBU DISTRICT, BIMA REGENCY**

**Lila Ariani¹, Mardiah², Ramayanto³
Student¹, First Consultant², Second Consultant³**

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

This research intends to determine the Bima Regency Government's policies in developing Lariti Beach Tourism Objects and the influence of those policies on the growth of Lariti Beach Tourism at this moment. This study employs a descriptive qualitative approach. Several policies of the Bima Regency Government are involved in developing Lariti Beach Tourism Objects. According to Article 19 of Law No. 10 of 2009 on Tourism, which encompasses the following topics: Pioneering the creation of tourist attractions to foster DPD and regional development, Tourist attraction development to improve product quality and competitiveness in attracting interest and loyalty to existing market segments, tourist attraction strengthening to increase product competitiveness in attracting repeat tourist visits and wider market segments, tourist attraction revitalization to improve quality, sustainability, and competitiveness of products and DPD, and there are also several impacts, including economically, natural resources (SDA), and human resourcing (HR). Through the Bima Regency Government, the Bima Regency Tourism and Culture Office continues to provide policies fostering and facilitating and increasing service quality through human resource training and education. To the people of Soro Village, to continue to preserve what the Bima Regency Government has facilitated, such as creating road infrastructure and other facilities. Lariti Beach must also keep its cleanliness, distinctiveness, and authenticity.

Keywords: Policy Evaluation of Bima Regency Government

MENGESAHKAN

**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Konsep Evaluasi.....	9
2.2.2 Kebijakan Pemerintahan	14
2.2.3 Pengembangan Pariwisata.....	20
2.2.4 Konsep Pariwisata.....	24
2.3 Kerangka Berpikir.....	29

2.4 Devinisi Konsep.....	30
2.5 Hipotesis Kerja.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitan.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Profil Desa Soro	38
4.1.2 Visi dan Misi Desa Soro	40
4.1.3 Motto	41
4.1.4 Letak dan Luas Wilayah.....	41
4.1.5 Data Jumlah Penduduk Desa Soro Menurut Jenis Pendidikan....	42
4.1.6 Struktur Organisasi Desa Soro	43
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima	44
4.2.2 Pemetaan Kondisi Saat Ini	48
4.2.3 Pemetaan Sasaran.....	54
4.2.4 Pemetaan Hambatan.....	57
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Kebijakan pemerintah kabupaten bima dalam mengembangkan pantai lariti.....	60

BAB V PENUTUP

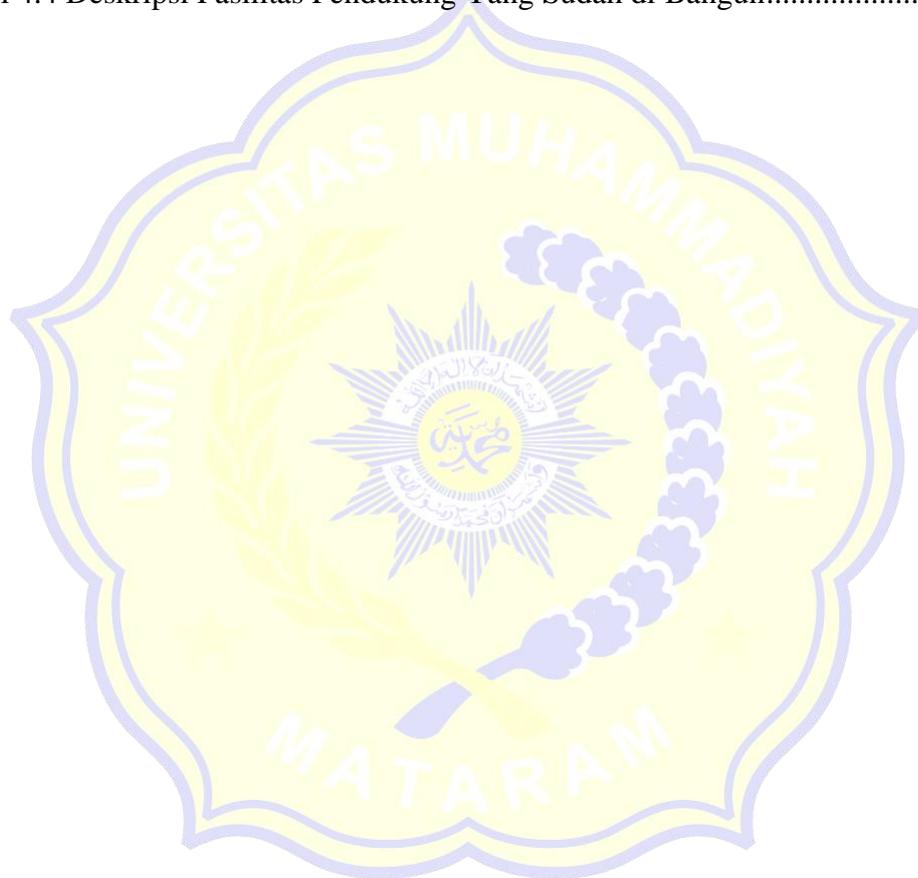
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

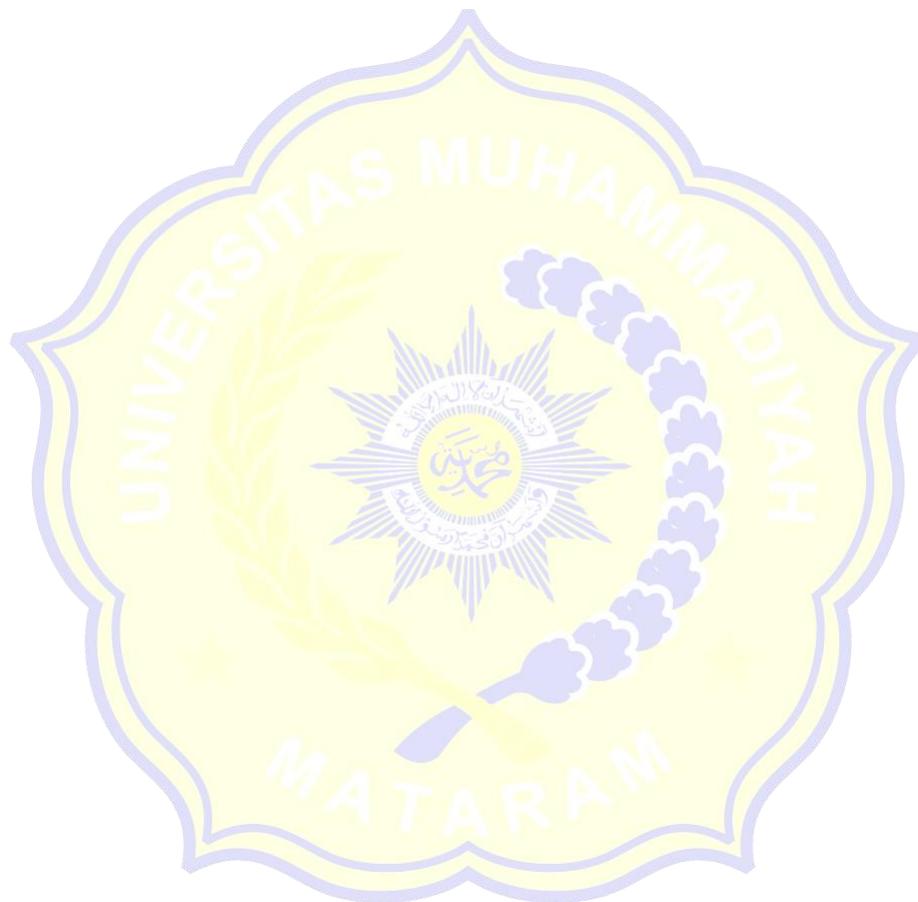
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Soro Tahun 1920-2020.....	40
Tabel 4.2. Deskripsi Batas Wilayah Desa Soro	43
Tabel Daftar kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2020. 3 Deskripsi Daftar kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2020.....	51
Tabel 4.4 Deskripsi Fasilitas Pendukung Yang Sudah di Bangun.....	54



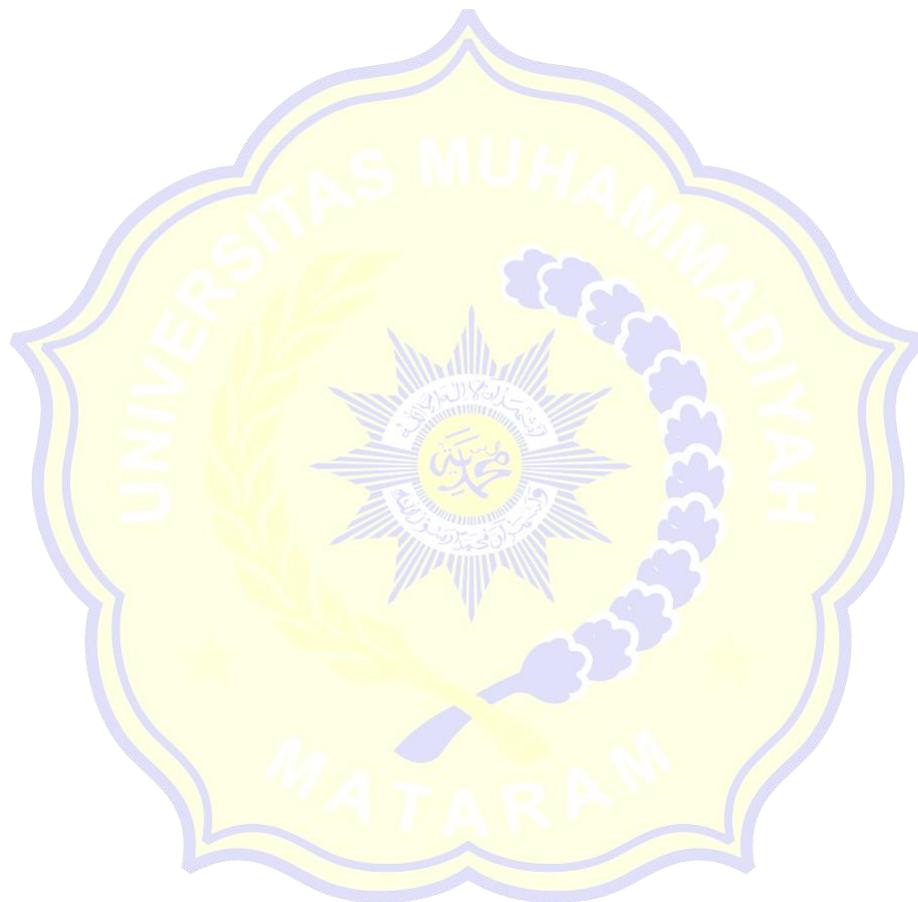
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 2.2 Posko Satgas Covid-19.....	39
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Desa Soro	44
Gambar 2.4 Kondisi Pantai Lariti	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil dokumentasi penelitian
2. Surat izin penelitian
3. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
4. Lembar konsultasi skripsi
5. Berita acara pengujian



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang indah dan kaya akan alam dan budaya. semua itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai objek dan daya tarik wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ialah sumber devisa negara yang bisa menaikkan pendapatan negara serta rakyat pada lokasi objek wisata (Pitana serta Gayatri, 2005).

Maka dalam hal ini, agar kita mengetahui apa saja yang disebutkan di atas, maka pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal sebagai otonomi daerah. Dalam otonomi daerah yang terdiri atas UU no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, bahwa wilayah diberikan hak serta wewenang buat mengatur serta mengurus wilayahnya masing-masing sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, menjadi konsekuensi apa yang menjadi proses pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, PEMDA diperlukan memiliki kemampuan mengidentifikasi serta mengelola potensi-potensi yang ada pada wilayahnya, buat dimanfaatkan secara efektif serta efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan pada rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya.

Oleh sebab itu PEMDA berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya yaitu berupa pengembangan serta pengelolaan sektor pariwisata, yang dibutuhkan bisa menaikkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Jadi pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional buat mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh warga Indonesia, dalam hal ini kekayaan wilayah nusantara menjadi modal dan landasan dalam proses pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan sehingga dapat di lihat oleh masyarakat .

Berkembangnya pariwisata pada suatu daerah dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat , yakni secara ekonomi, sosial serta budaya. Akan tetapi apabila pengembangannya tidak dipersiapkan dan tidak dikelola secara baik, justru akan menyebabkan banyak konflik yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Buat menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meminimalisasi akibat negatif yang mungkin ada, maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni melakukan penelitian terhadap seluruh sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2010).

Wisata Pantai Lariti Bima adalah pantai yang unik sebab pantai lariti nyaris seperti ilustrasi laut yang terbelah dua mirip kisah nabi musa AS yang membela lautan. Pantai Lariti ini berada pada Desa Soro, kecamatan

Lambu Sape, Kabupaten Bima, Nusan Tenggara Barat. Pelabuhan Sape sendiri ialah gerbang laut yang menghubungkan ujung Sumbawa dengan Nusa Tenggara Timur. Pantai Lariti mampu di tempuh dari pelabuhan sape sekitar 20 menit menggunakan motor atau mobil dan lebih kurang 30 mnt menggunakan sampan. (LU Ali 2020)

Jarak tempuh Pantai Lariti dari Kota Bima mampu di tempuh dalam waktu satu jam dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Jalan menuju objek pantai ini baru saja selesai di perbaiki. ada beberapa tambahan penataan yang telah di upayakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima untuk memperindah objek wisata pantai lariti ini. Penataan yang dilakukan oleh pihak tersebut yaitu pembuatan gerbang dan serambi pelestarian jalan dalam daerah, plaza ekonomi kreatif dan pusat jajanan kuliner tradisional. dan infrastruktur jalan telah mulus hingga kepantai, wc/toilet umum sudah di bangun serta pembuatan taman di sekita bibir pantai. (sekilasinfontb.com 2021)

Pengembangan sebagai tempat objek wisata, sangat di perlukan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bima terlebih khusus Pemerintah Kabupaten Bima dan warga setempat, dan pengetahuan kondisi serta keberadaan asal daya alam objek wisata pantai lariti didesa soro kecamatan lambu sape. Hal ini mengingatkan bahwa pada pengembangan objek wisata perlu didukung oleh kondisi yang sesuai atas dasar rasa keinginan wisatawan. dari penjelasan di atas penulis merasa tertarik buat mengangkat serta meneliti skripsi yang berjudul “evaluasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Bima dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa sajakah bentuk kebijakan pemerintah kabupaten bima dalam pengembangan objek wisata Pantai Lariti?
2. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah kabupaten bima bagi perkembangan wisata pantai lariti saat ini?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Apa sajakah bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima bagi Perkembangan Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape saat ini

1.3.2 Manfaat Penelitian

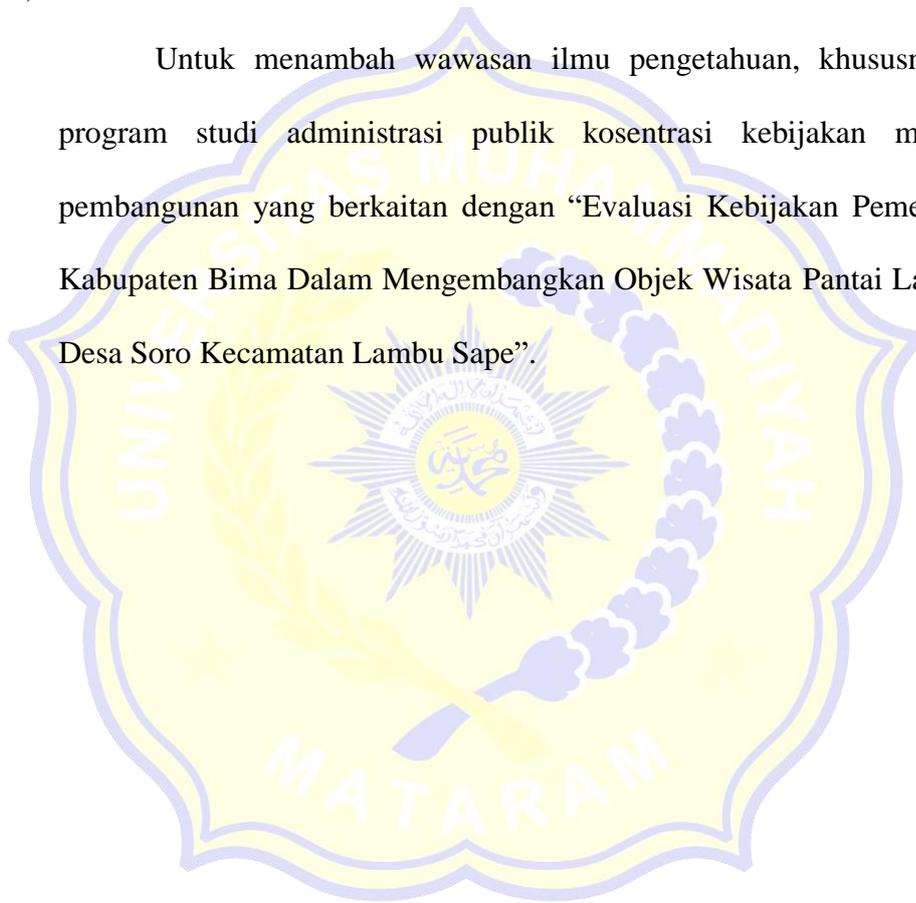
Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan bagi pengelola objek wisata agar mengelola objek wisata pantai sejalan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape .

2) Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di program studi administrasi publik konsentrasi kebijakan maupun pembangunan yang berkaitan dengan “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape”.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terhadulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

No	Penulis	Tahun Judul	Persamaan Dan Perbedaan/relevansi	Hasil Penelitian
1	Afrizal, Zaili Rusli dan Febri Yuliani (2018)	Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan tentang objek wisata unggulan hapanasan	<p>Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Objek Wisata.</p> <p>Perbedaan, Antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu Afrzal membahas tentang Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan tentang objek wisata unggulan hapanasan dengan lokasi penelitiannya di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Soro Kecamatan Labu Sape Kabupaten Bima.</p>	<p>Dalam sadar wisata bukan hanya melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata melainkan juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pariwisata, menjadi pelaku di sektor wisata serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan iklim yang kondusif sebagai tuan rumah yang baik untuk mampu menciptakan kondisi yang aman, bersih, tertib, nyaman, indah, ramah dan kenangan atau yang sering disebut dengan Sapta Pesona. Dalam pengembangan kebijakan pariwisata ditemukan masih minimnya penyediaan aksesbiltas, transportasi, infrastruktur, fasilitas pendukung dan akomodasi objek wisata unggulan, seperti jalan rusak menuju objek wisata unggulan Hapanasan, tidak adanya transportasi khusus menuju objek wisata unggulan, masih minimnya pusat penjualan cendramata dan tidak ada</p>

				adanya rumah makan serta penginapan yang berada di sekitaran objek wisata unggulan Hapanasan.
2.	Medlin Anggrey ni Hura (2020)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias	<p>Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Objek Wisata.</p> <p>Perbedaan, Antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu Medlin Anggrey ni Hura membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona dengan lokasi penelitiannya di Kabupaten Nias sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Soro Kecamatan Labu Sape Kabupaten Bima.</p>	Berdasarkan hasil peneliti mengenai pedoman kebijakan pengembangan pariwisata, dalam melaksanakan pengembangan pariwisata di KabupaNias, Dinas Pariwisata berpedoman pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Nias 2018-2025. Berdasarkan Perda tersebut dilakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias dengan mengaktualisasikannya dalam bentuk program atau kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun berkenan.
3.	Bima (2017)	Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan	<p>Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Objek Wisata.</p> <p>Perbedaan, Antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu Bima membahas tentang Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan dengan lokasi penelitiannya di Kabupaten Jepara sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti dengan</p>	Pengembangan daerah wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni melalui pengembangan sumber daya manusia yang didalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan bahasa inggris, study banding, pelatihan guide, pengelolaan homestay dan lainnya, pengembangan produk wisata dengan pembangunan saran dan prasarana yang ada, pengembangan pasar dan pemasaran dengan menambahkan media informasi berbasis website dan image promotion serta pengembangan kelembagaan

			lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Soro Kecamatan Labu Sape Kabupaten Bima.	dengan membentuk kelompok sadar wisata obyek wisata Pantai Bandengan.
4.	Ayu Ardila Sari, STPMD “APMD ” Yogyakarta (2014)	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Magelang	<p>Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Objek Wisata.</p> <p>Perbedaan, Antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu Ayu Ardila Sari membahas tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Magelang dengan lokasi penelitiannya di Kabupaten Magelang sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti ” dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Soro Kecamatan Labu Sape Kabupaten Bima.</p>	<p>1. Pihak Dinas Pariwisata maupun Badan Pengelola obyek wisata selalu mengadakan promosi untuk mengenalkan obyek wisata ketep pass selain itu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti biro travel, media cetak maupun elektronik, dan juga mengadakan road show ke luar daerah tidak lain untuk mempromosikan obyek wisata Kabupaten Magelang terutama Ketep Pass.</p> <p>2. dinas pariwisata dan kebudayaan dan badan pengelola Ketep Pass melakukan komunikasi pemasaran dalam rangka pengembangan pariwisata. Komunikasi pemasaran tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk promosi pariwisata secara nasional dan internasional agar menarik pengunjung (wisatawan) Suntut berkunjung dan menikmati keindahan alam yang ada di desa Ketep, bentuk promosinya adalah membuat iklan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik.</p>

2. Landasan Teori

2.2.1 Konsep Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Sangat perlu dalam memilih bagaimana program-program yang sesungguhnya berjalan, buat mengukur hasil kondisi pelaksanaan dan menelaah apakah program dilaksanakan sinkron dengan apa yang pada inginkan serta bila tidak, berada pada posisi buat menghentikan atau memperbaiki. Penyelidikan yang dibutuhkan ini diklaim suatu evaluasi. penilaian dalam penggunaannya yang paling umum merupakan suatu proses yang dilakukan buat menentukan nilai (value). (Frank 2015).

Rossi dan Freeman (2012) menyatakan tentang evaluasi menjadi berikut :

“Evaluation onderzoek existentie a systematic application of sosial onderzoek prosedures ter assessing the concepualization and design, implementation, and ulitily of social interventiation programs.”

Berdasarkan kedua pakar evaluasi di atas, evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial tentang konsepsialisasi serta pendisainan, implementasi dan pemanfaatan program sosial yang dilakukan pemerintah.

Vendung (2012) menyatakan yaitu :

“Evaluation is limited to governmen intervention only, that existentie, politically or administratively planned social change, like public policies, public programs, and public service.”

Menurut Vendung, evaluasi berkaitan menggunakan interviu pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan contohnya kebijakan publik, program publik serta layanan publik. evaluasi melihat kebelakang agar bisa menyetir kedepan. Evaluasi merupakan mekanisme buat memonitor, mensistematikan, serta menaikkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sebagai akibatnya pejabat publik dalam pekerjaanya pada masa akan tiba dapat bertindak dan bertanggungjawab, kreatif serta seefisien mungkin. Sedangkan pandangan lain berasal Wilyam N. Dunn (2003) kata evaluasi bisa disamakan menggunakan penaksiran (appraisal), hadiah angka (rating), dan evaluasi (assesment). penilaian berkenan dengan produksi berita tentang nilai atau manfaat akibat kebijakan.

Terdapat beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa evaluasi ialah kegiatan buat mengumpulkan isu tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut dipergunakan buat memilih alternatif yang tepat pada sebuah keputusan Jenis dan Model Evaluasi

Ernest R. House (2003:197) membagi model evaluasi mejadi 8 (delapan) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi ,
2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas,
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas,

4. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial,
5. Model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat,
6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional
7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi, dan
8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sedangkan Wirawan (2012 : 16) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Evaluasi kebijakan

“Kebijakan merupakan rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru, umumnya karena kebijakan yang dulu tidak efektif dan efisien atau karena terjadi pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda menggunakan kebijakan pejabat sebelumnya”.

b. Evaluasi Program

Program merupakan aktivitas atau kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan serta dilaksanakan pada waktu yang

tidak terbatas. Evaluasi acara ialah “metode sistematis buat mengumpulkan, menganalisis, dan memakai info untuk menjawab pertanyaan dasar tentang program”. penilaian acara bisa dikelompokkan menjadi penilaian proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan penilaian dampak (impact evaluation). Program Pengembangan Pariwisata yang artinya acara Pemerintah Daerah kabupaten Bima di bidang kepariwisataan yang ada dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, sesuai dengan jenis penilaian yang terdapat maka masuk pada jenis evaluasi acara dan akan di penilaian menggunakan tahapan penilaian program yang sinkron.

c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek menjadi “aktivitas kegiatan yang dilaksanakan buat jangka saat tertentu untuk mendukung suatu program.

d. Evaluasi material

Evaluasi material, buat melaksanakan kebijakan, program atau proyek diharapkan sejumlah material atau produk-produk eksklusif. contohnya, buat melaksanakan acara Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat poly penumpang, tahan usang, ekonomis bahan bakar, serta porto

pemeliharaannya yang murah. oleh sebab itu, bus yang dipergunakan Bus Way dinilai menggunakan kriteria tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal menggunakan penilaian kinerja dilakukan buat mengetahui pengembangan asal daya insan atau human resources development. penilaian asal daya manusia bisa dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, usaha serta lembaga swadaya masyarakat”.

3. Tujuan evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22) ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.

10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi

sesuai jenis evaluasi berdasarkan Wirawan, maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba buat mengevaluasi program, yang dalam hal ini merupakan program Pengembangan Pariwisata dalam upaya mewujudkan pariwisata nasional pada Kabupaten Bima melalui destinasi pariwisata yang didalamnya ada Daya Tarik Wisata, fasilitas umum , fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta warga yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

2.2.2 Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pada kamus bahasa Indonesia kebijakan asal berasal istilah bijak yang berarti pandai, mahir. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan pada suatu rangkaian konsep yang sebagai garis akbar serta dasar planning aplikasi suatu pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak pada pemerintahan atau organisasi menjadi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud menjadi garis panduan untuk manajemen dalam perjuangan mencapai target. Kebijaksanaan diartikan sebagai akal budi memakai nalar budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atau kecakapan bertindak bila menghadapi kesulitan.

Menurut Thoha (2006:56), dalam arti luas kebijakan mempunyai dua aspek pokok yaitu:

- a. Kebijakan adalah praktika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Kebijakan yang didapatkan pemerintah asal asal segala insiden dalam rakyat dan digunakan juga buat kepentingan masyarakat. Praktika sosial merupakan problem atau problema rakyat, problema ini kemudian dijadikan isu. gosip inilah yang selanjutnya dapat sebagai kebijakan. oleh sebab itu, kebijakan tumbuh dari suatu peristiwa yang sah-benar terjadi dalam suatu praktika berasal masyarakat.
- b. Kebijakan merupakan suatu peristiwa yang disebabkan buat mendamaikan “claim” berasal pihak-pihak yang pertarungan atau buat menciptakan “incentive” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut memutuskan tujuan tetapi menerima perlakuan yang tidak rasional dalam perjuangan bersama tersebut. dengan demikian Bila ada pihak-pihak yang pertarungan, usaha buat mengatasinya diantaranya melalui pengambilan kebijakan.

berdasarkan 2 aspek pokok tadi, bisa dinyatakan bahwa pada suatu kebijakan ada tindakan yang dilatarbelakangi oleh berita yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan tersebut bisa berbentuk suatu usaha yang kompleks serta dilakukan buat kepentingan rakyat. Sebuah kebijakan bertujuan buat mengatasi masalah atau perseteruan sebagai akibatnya terwujudnya suatu keadaan yang diinginkan. di

pada dasarnya kebijakan serius kepada kepentingan warga pada pencapaian kesejahteraan.

2. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Berdasarkan Abidin (2004:4), dilihat asal segi struktur, unsur kebijakan terdiri asal unsur tujuan kebijakan, unsur masalah, unsur tuntutan (*demand*), unsur akibat (*outcomes*), unsur wahana atau indera kebijakan (*policy instrument*) :

a. Unsur Tujuan Kebijakan

Berdasarkan Abidin (2004:4), dicermati dari segi struktur, unsur kebijakan terdiri berasal unsur tujuan kebijakan, unsur masalah, unsur tuntutan (*demand*), unsur akibat (*outcomes*), unsur sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*) :

b. Unsur Masalah

Pada sebuah kebijakan unsur problem merupakan unsur yang sangat krusial. Jika ada kesalahan pada memilih atau mengidentifikasi masalah maka akan mengakibatkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Bila suatu metode yang baik dilakukan buat memecahkan duduk perkara yang tak tepat maka tidak akan ada merupakan.

c. Unsur Tuntutan (*demand*)

Partisipasi merupakan salah satu tanda asal rakyat maju. Partisipasi dapat berupa dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik. Tuntutan muncul karena warga merasa terabaikan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa

dirugikan serta tidak dipenuhi kepentingannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut pada proses perumusan kebijakan atau karena kalah pada persaingan antar banyak sekali kekuatan, meskipun jumlah mungkin tercapai atau suatu duduk perkara terpecahkan.

d. Unsur Dampak (*outcomes*)

Akibat ditimbulkan berasal tindakan yang sudah dilakukan. akibat ada menjadi efek dari tercapainya tujuan. dampak bisa bersifat positif dan negatif. Besarnya akibat yang disebabkan dari setiap jenis kebijakan susah diperhitungkan. Hal ini ditimbulkan karena tidak tersedianya fakta yang relatif. bisa saja data ada dilapangan di taraf lokal, tetapi tidak terdapat data di instansi tingkat nasional atau wilayah. sebab itu peran dan warga bawah dalam proses penyusunan serta evaluasi suatu kebijakan yang sangat krusial.

e. Unsur Sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*)

Pelaksanaan suatu kebijakan dilakukan dengan menggunakan wahana. Beberapa dari wahana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis serta perubahan kebijakan itu sendiri.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dan winarno (2008:32), terdapat 6 (enam) tahapan, yaitu Tahapan Penyusunan rencana, termin

Formulasi Kebijakan, tahap Adopsi Kebijakan, tahap Implementasi Kebijakan, termin evaluasi Kebijakan.

a. Tahapan Penyusunan Rencana.

Di termin penyusunan agenda para pejabat menempatkan dilema pada agenda publik. tidak seluruh problem dapat masuk ke dalam rencana kebijakan. Setiap persoalan akan disaring melalui proses seleksi agar bisa masuk kedalam rencana kebijakan, sehingga hanya terdapat beberapa problem yang telah lulus seleksi yang masuk ke pada agenda kebijakan para perumus kebijakan. umumnya duduk perkara akan dinilai asal tingkat kepentingannya. Oleh karena itu, akan ada dilema yang didahulukan buat menjadi fokus pembahasan serta dicari penyelesaiannya terlebih dahulu ad interim yang lainnya wajib ditunda sebab pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini dilema yang sudah masuk ke pada rencana kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para penghasil kebijakan. problem-duduk perkara tadi kemudian diidentifikasi serta selanjutnya akan dicari pemecahan dan penyelesaian masalah yang sinkron serta terbaik. Akan ada cara lain atau pilihan kebijakan yang ada maka berasal itu akan diseleksi dan dipilih cara lain kebijakan apa yang dapat menjawab penyelesaian asal problem-duduk perkara tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Di tahap adopsi kebijakan, di gunakan dengan cara lain kebijakan ditawarkan oleh para perumus kebijakan akan diadopsi menggunakan dukungan dari secara umum dikuasai legislatif, mufakat antara direktur forum atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap pada mana alternatif kebijakan yang sudah diputuskan menjadi cara lain pemecahan problem diimplementasikan. Bila suatu program kebijakan tidak diimplementasikan maka acara tersebut hanya menjadi catatan-catatan elit saja serta pastinya tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat karena tak diimplementasikan. Implementasi keputusan program kebijakan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan sang unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial serta insan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan atau diimplementasikan akan dievaluasi atau dinilai, supaya dapat diketahui sudah sejauh mana kebijakan yang sudah didesain mampu memecahkan serta menuntaskan duduk perkara. Kebijakan publik bertujuan buat memberikan dampak yang diinginkan serta memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat. oleh karena itu, akan dipengaruhi ukuran-berukuran yang

menjadi dasar buat menilai apakah kebijakan publik sudah mencapai akibat yang diinginkan

2.2.3 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata artinya pengembangan suatu wilayah tujuan pariwisata yang melibatkan banyak unsur sehingga menyampaikan akibat positif terhadap perkembangan pariwisata. dalam hal ini pengembangan berarti proses pengembangan suatu hal berasal yang tak ada sebagai terdapat dan asal yang sudah terdapat menjadi lebih baik.

Menurut Carter & Fabricius (2013: 172), aneka macam elemen dasar yang wajib diperhatikan dalam perencanaan pengembangan sebuah destinasi pariwisata, paling tidak mencakup aspek Pengembangan Atraksi serta Daya Tarik Wisata, Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata, Pengembangan Aksesibilitas dan Pengembangan Image (citra Wisata).

- a) Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata, suatu objek wisata tentunya memiliki daya tarik yang menarik minat para wisatawan sehingga termotivasi serta memiliki harapan buat mengunjungi destinasi tadi. Maka asal itu diperlukan pengembangan daya tarik wisata. Semakin menarik suatu objek wisata maka wisatawan akan semakin tertarik buat mengunjungi objek wisata tadi. Atraksi wisata bisa berwujud arsitektur bangunan (mirip candi, piramida, monumen dan lain-lain), karya seni budaya (mirip museum, seni pertunjukkan, seni rupa serta lain-lain) dan pengalaman eksklusif ataupun bentuk event pertunjukkan.

- b) Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata, yang dimaksud dengan amenities merupakan fasilitas dasar seperti jalan raya, transportasi, sentra isu serta aneka macam fasilitas pendukung lainnya guna memperlancar aktivitas kepariwisataan dan guna menyampaikan ketenangan bagi wisatawan.
- c) Pengembangan Aksesibilitas, aksesibilitas wisata pada hal ini adalah wahana yang mempermudah wisatawan untuk mencapai suatu destinasi. Aksesibilitas tak hanya menyangkut transportasi namun juga waktu yang diperlukan, pertanda penunjuk arah menuju lokasi wisata serta lain-lain.
- d) Pengembangan Image (citra Wisata), hal ini adalah kegiatan Pencitraan (image building) sebuah destinasi artinya bagian berasal positioning, yaitu kegiatan untuk menciptakan gambaran atau image di benak wisatawan.

Positioning bertujuan untuk membantu wisatawan dalam rangka mengetahui disparitas yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaingnya, sebagai akibatnya suatu destinasi memiliki ciri pembeda atau keunikan yang membedakannya menggunakan destinasi lain. dari UN-WTO serta Ridwan (2012:27), kiprah pemerintah pada menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal yaitu:

- a) membentuk kerangka operasional di mana sektor publik serta swasta terlibat pada menggerakkan pariwisata

- b) Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan pada pariwisata, perlindungan lingkungan serta pelestarian budaya,
- c) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut serta udara, dengan kelengkapan prasarana komunikasinya,
- d) membentuk serta memfasilitasi peningkatan kualitas asal daya insan menggunakan menjamin pendidikan serta training yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata,
- e) Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam planning konkrit yang mungkin termasuk pada dalamnya: (a) evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam serta budaya serta mekanisme proteksi serta pelestarian; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif; (c) memilih persyaratan serta ketentuan penyediaan infastruktur dan suprastruktur yang diperlukan yang akan berdampak pada acara (performance) pariwisata; (d) mengelaborasi program buat pembiayaan dalam kegiatan pariwisata, baik buat sektor publik juga partikelir.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan perumusan perencanaan pengembangan pariwisata dikemukakan sang Ridwan (2012:38):

- a) Perencanaan pegembangan pariwisata haruslah artinya suatu kesatuan menggunakan pembangunan regional serta nasional asal pembangunan perekonomian, sosial serta budaya.

- b) Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah dilakukan secara terpadu menggunakan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
- c) Perencanaan pengembangan pariwisata wilayah haruslah dibawah koordinasi perencanaan fisik wilayah secara holistik.
- d) Perencanaan fisik pengembangan pariwisata harus didasarkan suatu studi atau penelitian dan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya di sekitar daerah pengembangan.
- e) Perencanaan fisik pengembangan pariwisata tak hanya dilihat dari segi administrasi, namun wajib sinkron menggunakan lingkungan alam lebih kurang menggunakan memperhatikan faktor geografis yang lebih luas.
- f) Perencanaan pengembangan pariwisata tidak hanya memperhatikan dilema dari segi ekonomi saja, namun pula wajib memperhatikan problem dari segi sosial dan budaya yang ditimbulkannya.
- g) Perencanaan pengembangan pariwisata keliru satu tujuannya adalah buat menyampaikan kesejahteraan masyarakat. oleh sebab itu perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan peningkatan kolaborasi menggunakan negara-negara lain yang saling menguntungkan khususnya di bidang pariwisata.

Terarah fokus dan tidak dilakukan secara impulsif. dalam pengembangan pariwisata hal yang wajib diperhatikan, sebab pariwisata mempengaruhi aktivitas-kegiatan diberbagai sektor. Hal ini

sejalan dengan pernyataan Pendit serta Sunayo (2013:13), yang menyatakan bahwa kepariwisataan bisa memberikan dorongan eksklusif terhadap kemajuan pembangunan seperti pemugaran pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya serta kelestarian lingkungan serta sebagainya, yang kesemuanya bisa memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat pada lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.

Pernyataan pada atas menandakan bahwa kepariwisataan memiliki impak besar dalam berbagai aspek. Maka berasal itu diperlukan perencanaan yang baik sebagai akibatnya tujuan yang diinginkan bisa dicapai semaksimal mungkin.

2.2.4 Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas berpergian dari satu tempat ke daerah yang lainnya menggunakan tujuan rekreasi. McIntosh & Gupta (2003:34), menyatakan bahwa pariwisata ialah adonan gejala serta korelasi yang ada dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan tempat tinggal serta rakyat tuan tempat tinggal dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan dan para pengunjung lainnya. asal pernyataan McIntosh & Gupta di atas, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup pariwisata tidak terlepas asal korelasi timbal pulang di dalamnya. ada proses take and give yang terjadi pada antara wisatawan serta pelaku penyedia jasa

pariwisata. tapi, hubungan ini tidak hanya terjadi antara wisatawan, penyedia jasa pariwisata dan masyarakat sekitar saja namun terdapat juga keterlibatan pemerintah selaku pemegang otoritas penuh pada aplikasi kebijakan. sementara itu, menurut Wahab (2018:1), pariwisata artinya salah satu jenis industri baru yang mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Wahab (2014:20), juga mengemukakan bahwa Pariwisata mengandung 3 unsur antara lain: manusia yakni unsur insani menjadi pelaku aktivitas pariwisata, kawasan yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan ketika yakni unsur tempo yang dihabiskan pada perjalanan tersebut serta selama berdiam di daerah tujuan. dari Yoeti (2014:20), syarat suatu bepergian disebut sebagai bepergian pariwisata bila:

- a) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke daerah yang lain, diluar kawasan kediaman orang tadi tinggal.
- b) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-suka dan tidak mencari nafkah pada tempat atau negara yang dikunjungi.
- c) Semata-mata menjadi konsumen di daerah yang dikunjungi.

Pariwisata dapat menjadi alat penarik investasi di daerah yang memiliki potensi sangat besar. Wardiyanto & Baiquni (2011:36), mengemukakan keunggulan pariwisata sebagai berikut:

- a) Pengembangan pariwisata merupakan hal yang bisa dilaksanakan menggunakan waktu yang paling cepat;

- b) Pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan menggunakan metode yang paling praktis dan sederhana;
- c) Pengembangan pariwisata akan melibatkan rakyat, sebagai akibatnya banyak pihak dapat menikmati kegunaannya;
- d) Pengembangan pariwisata tidak hanya memerlukan asal daya insan yang mempunyai kompetensi tinggi, namun juga yang berkompentensi menengah dan rendah;
- e) Pengembangan pariwisata bisa mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya serta sosial rakyat;
- f) kendala pengembangan pariwisata cukup lebih sedikit Bila dibanding menggunakan sektor lain. misalnya buat sektor pertanian, akan terkendala masalah keberlanjutan huma dan akses terhadap pasar. buat pertambangan, hambatan yang akan dihadapi ialah bahwa deposit akan habis serta bisa berdampak buruk di alam dan rakyat;
- g) Pengembangan pariwisata menunjukkan cara yang cepat buat membangun industri pendukung, yakni: hotel, restoran, penyewaan bus pariwisata, penyewaan bahtera, industri souvenir dan lain-lain.

Dari poin-poin yang dikemukakan sang Wardiyanto pada atas, perlu diketahui bahwa meskipun pengembangan pariwisata tergolong cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, tetap saja dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan ketika sebab pengembangan pariwisata tidak terjadi begitu saja. Perkembangan pariwisata pada suatu wilayah akan memberikan perubahan di daerah tersebut. Tentunya perubahan yang diinginkan

merupakan perubahan yang positif. Terjadinya perubahan yang positif bila proses pengembangannya telah dilakukan sinkron menggunakan prosedur yang sah. Proses perencanaan yg matang pula akan mendukung terjadinya perubahan yg positif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 ihwal Kepariwisata Bab I (Ketentuan umum) Pasal 1 dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan:

- a) Wisata adalah aktivitas bepergian yang dilakukan sang seorang atau sekelompok orang menggunakan mengunjungi tempat tertentu buat tujuan rekreasi, pengembangan eksklusif atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b) Wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata.
- c) Pariwisata artinya aneka macam macam kegiatan wisata serta didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh warga , pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d) Kepariwisataannya artinya holistik aktivitas yang terkait menggunakan pariwisata serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang ada sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta negara serta hubungan antara wisatawan serta rakyat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, pemda serta pengusaha.
- e) Daya Tarik Wisata artinya segala sesuatu yang memiliki keunikan, estetika dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya serta hasil buatan insan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- f) daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah tempat geografis yang berada dalam satu atau lebih daerah administratif yang didalamnya ada daya tarik wisata, fasilitas umum , fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta warga yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g) perjuangan Pariwisata artinya perjuangan yang menyediakan barang serta/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjuangan pariwisata.
- i) Industri Pariwisata ialah gugusan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka membentuk barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata.
- j) daerah Strategis Pariwisata artinya tempat yang mempunyai fungsi primer pariwisata atau mempunyai potensi buat pengembangan pariwisata yang mempunyai impak krusial dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan asal daya alam, daya dukung lingkungan hayati, serta pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan pengertian di atas bisa diketahui bahwa Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata. kegiatan wisata pada hal ini

didukung sang berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh rakyat, pengusaha, Pemerintah dan pemda. sementara itu, pengertian Kepariwisata ialah seluruh kegiatan yang berkaitan menggunakan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara dan hubungan antara wisatawan dan warga setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, pemda dan pengusaha. kata-istilah yang dikemukakan di atas merupakan kata-kata yang berkaitan menggunakan pariwisata.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Macmillan Dictionarz kerangka berpikir adalah seperangkat bentuk prinsip, ide, dan lainnya yang senantiasa dipergunakan saat membuat keputusan dan penilaian studi kasus yang rinci tentang sesuatu untuk menemukan fakta-fakta baru dalam penelitian.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



2.4 Definisi Konsep

- a) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah buat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Implementasi Kebijakan merupakan tahap aplikasi kebijakan. pada hal ini menggunakan dilakukannya aplikasi kebijakan maka diharapkan tujuan yang sudah disepakati dapat tercapai serta dapat memberi dampak yang diinginkan.
- c) Pariwisata ialah aneka macam macam aktivitas wisata serta didukung aneka macam fasilitas serta layanan yang disediakan sang rakyat, pengusaha dan Pemerintah.
- d) Pengembangan Pariwisata merupakan proses pengembangan objek wisata juga wilayah tujuan wisata sebagai akibatnya menyampaikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata.
- e) standar serta target kebijakan pengembangan pariwisata sebagai tolak ukur keberhasilan pengimplementasian kebijakan. baku serta sasaran yang jelas, terukur serta realistis akan meminimalisir terjadinya pertarungan pada ketika merealisasikan kebijakan.
- f) asal daya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata artinya sumber daya yang diharapkan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan pariwisata, sebagai akibatnya tujuan yang diinginkan bisa tercapai. sumber daya yang dibutuhkan dapat berupa sumber daya finansial serta sumber daya insan.

- g) karakteristik pelaksana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ialah ciri-ciri atau kekhasan yang dimiliki oleh pelaksana. ciri tidak terlepas berasal struktur birokrasi dan meliputi siapa yang terlibat dalam aplikasi kebijakan pengembangan pariwisata serta bagaimana bentuk dukungan yang diberikan.
- h) perilaku atau disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkaitan penerimaan atau penolakan dari pelaksana pada mengimplementasikan sebuah kebijakan pariwisata. Apakah pelaksana merogoh sikap tegas dan berkomitmen dalam menjalankan sebuah kebijakan atau merogoh perilaku tak tegas atau cenderung mengabaikan atau bahkan menolak.
- i) Komunikasi antar badan pelaksana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ialah komunikasi serta koordinasi yang dilakukan pada pengembangan pariwisata. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang berbeda-beda sebagai akibatnya diperlukan komunikasi serta koordinasi yang baik agar proses implementasi bisa berjalan dengan baik.
- j) Dukungan lingkungan sosial, ekonomi serta politik dalam implementasi pengembangan pariwisata artinya lingkungan eksternal yang mensugesti implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Ketiga aspek ini akan menjadi faktor yang dapat mendukung ataupun Mengganggu implementasi kebijakan pariwisata.

2.5 Hipotesis Kerja

Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis kerja yaitu: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Sape Kabupaten Bima. terkait dengan Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposisi) Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lariti di Desa Soro kecamatan Lambu, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat.

Ini akan memberikan gambaran bukti nyata tentang kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri maupun tunggal, yaitu tanpa menghasilkan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu pula terbatas dari usaha mengatakan suatu persoalan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sebagai akibatnya sekedar buat mengungkap fakta dan menyampaikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi Hadari, 2007). Sedangkan dasar penelitiannya merupakan studi kasus.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor desa soro dan kantor dinas pariwisata dan kebudayaan pantai lariti, di mana kantor tersebut merupakan kantor yang terkait dan merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan.

3.3 Sumber Data

Data merupakan sebuah gambaran tentang suatu kejadian atau sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tempat dan waktu., yang merupakan dasar dari sebuah perencanaan dan dalam mengambil sebuah kesimpulan memerlukan alat bantu dalam hal ini terbagi atas dua, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang di peroleh secara langsung dari lokasi pelitian dalam hal ini melalaui wawancara langsung bersama beberapa narasumber yaitu, bapak iwan supriadi s.sos, bapak firmansyah, dan informan lainnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang di peroleh dari Database Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bima dan Database Kantor Desa Soro.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian tentang evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengembangkan Objek Pariwisata Pantai Lariti di Desa Soro Kecamatan Lambu Sape ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti guna memperoleh data dan hasil yang akurat, serta informan yang diambil menggunakan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap lebih mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu agar memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima

- 2) Kepala Desa Soro Kecamatan Lambu Sape Kabupaten Bima
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Wisatawan Pantai Lariti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu penelitian yang dilakukan agar memperoleh sejumlah data dengan cara melakukan proses tanya jawab serta diskusi langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.

b. Observasi/pengamatan langsung

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis apa saja yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen baik berupa buku pedoman maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan dan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang diduga menunjang dan relevan dengan persoalan, baik berupa buku pedomana, literatur, laporan dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data yang dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkahlangkah sebagai berikut :

a) Reduksi data

Dalam sebuah reduksi data dapat di lakukan dengan proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, dan apapun data yang muncul di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informai mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah dalam proses penelitian.

b) Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar data hasil yang di peroleh terorganisasikan, tersusun dalam sebuah pola, sehingga mempermudah pemahaman, penyajian data juga dapat di lakukan dalam bentuk sebuah uraian naratif.

c) Tahap akhir

Tahap akhir merupakan menarik sebuah kesimpulan yang di lakukan secara cerdas dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan-tinjauan ulang ada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.

